

# Nasib UMKM setelah Kampanye

Oleh Purwoko

SETIAP kali ada perdebatan saat kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada), materi yang selalu seksi diangkat adalah masalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Semua calon kepala daerah (cakada) dengan lantang dan beraninya akan membela UMKM. Tidak ada kecanggungan sama sekali saat cakada menyatakan bahwa dirinya adalah pembela UMKM. Pajangan etalase kampanye hampir dipenuhi oleh program UMKM dan Koperasi, namun realita menunjukkan usai kampanye dan sudah ada cakada yang terpilih pajangan etalase kampanye tersebut seolah hanya menjadi barang-barang rongsoakan yang tidak bermakna. Sangat ironis sekali. Dan ini selalu berulang. Apa yang harus dilakukan untuk menempatkan UMKM pada posisi yang seharusnya?

Data statistik tentang keberadaan UMKM tidak dapat dibantah. Jumlah UMKM yang menembus angka 60 juta, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat dan bekerja di UMKM mencapai 98,7% merupakan angka yang sangat fantastis. Namun posisi UMKM masih saja dianaktirikan saat ada upaya untuk menyejahterakan masyarakat. 270 daerah yang akan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 semua cakadanya menyampaikan betapa pentingnya peran UMKM dalam perekonomian masyarakat. Namun orasi para cakada tentang UMKM dan Koperasi ternyata masih sebatas lipstik yang merah dibibir saja. Lipstiknya telah menipu masyarakat, bahkan cenderung mengelabui masyarakat dan lipstik itu hanya untuk mendapatkan simpati saat Pilkada.



Kepala Bagian Perundang-undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Saydiman Marto, mengungkapkan pada Pilkada 2020, dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada, ada 290 cakada petahana yang maju di 236 daerah. Secara keseluruhan Pilkada 2020 diikuti oleh 714 pasangan calon (1/10/2020). Dengan banyaknya cakada petahana yang kembali mencalonkan diri menjadi cakada di pilkada serentak 2020, seharusnya keberadaan UMKM lebih baik. Belajar dari pengalaman selama 5 tahun saat menjabat kepala daerah, 290 cakada petahana harusnya belajar dari pengalaman dan tidak lagi mengkhianati janji saat kampanye.

## Goodwill Pemerintah

Menempatkan UMKM pada posisi utama dalam upaya menyejahterakan masyarakat sebenarnya sangatlah tepat dan sesuai dengan amanah UUD 1945. Ekonomi kerakyatan seharusnya tidak hanya menjadi slogan pembelaan terhadap rakyat, tetapi harus diaplikasikan dengan memberdayakan UMKM. Pelibatan secara aktif dan masif masyarakat dalam memberdayakan UMKM merupakan cara yang sa-

ngat tepat. Yang dibutuhkan saat ini ada goodwill dari kepala daerah setempat. Keberpihakan pemerintah pada UMKM harus ditingkatkan, tidak hanya saat kampanye, tetapi kebijakan-kebijakan yang diambil harus condong merangkul UMKM.

Postir anggaran yang dijalankan pemerintah dari pusat sampai daerah hampir semuanya berada pada posisi dibawah 1%. Padahal masyarakat yang terlibat pada UMKM sangat banyak. Bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dapat diwujudkan dengan memperhatikan jumlah anggaran yang disiapkan. Pada tahun 2020 pemerintah hanya menyiapkan anggaran Rp. 972,3 miliar. Anggaran yang sangat kecil dan dipastikan tidak cukup untuk mengurus sekitar 157 ribu koperasi dan sekitar 61.000 UMKM. Dari sisi anggaran ini terlihat bahwa keberpihakan pemerintah terhadap koperasi dan UMKM masih sebatas jargon politik belum membumi menyentuh langsung ekonomi kerakyatan. Walaupun realisasinya pada masa pandemi covid-19 ini banyak anggaran yang digelontorkan untuk koperasi dan UMKM, tetapi bukanlah anggaran rutin.

Siapa pun yang terpilih menjadi kepala daerah pada Pilkada serentak 2020 akan memikul beban yang berat karena posisi ekonomi masyarakat berada pada kondisi yang terpuruk. Secara nasional, ekonomi sudah masuk jurang resesi dengan pertumbuhan ekonomi kuartal III sebesar -3,49%. Untuk mengangkat angka tersebut melewati 0% bukanlah pekerjaan yang gampang. Di beberapa daerah pun angka pertumbuhan ekonominya juga berada pada posisi negatif. Diperlukan upaya secara gotong royong untuk mengembalikan kesaktian ekonomi

Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan memberdayakan UMKM secara maksimal.

Memulihkan kondisi UMKM ke level usaha yang sehat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: membuka selebar-lebar kesempatan bagi UMKM untuk terus berproduksi dengan memperhatikan protokol kesehatan, membantu mengembalikan degradasi permodalan akibat terbatasnya pasar dan mandeknya usaha dengan memberikan subsidi modal kerja dengan syarat yang gampang dan ringan, mendorong UMKM untuk mengambil peran menjadi penyuplai kebutuhan pokok masyarakat melalui kerja sama usaha dengan BUMN maupun BUMS, dan membebaskan UMKM dari beban-beban pajak sampai kondisi normal.

UMKM sudah jelas menjadi badan usaha yang sangat imun atau kebal terhadap guncangan akibat gempa ekonomi yang ditimbulkan oleh serangan pandemi Covid-19. Dalam kondisi terjelempun, UMKM sudah membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang paling tangguh daya hidupnya.

Dengan segala keterbatasan yang diberikan pemerintah, mulai dari modal kerja terbatas, pembinaan yang sangat kurang, pengawasan yang sangat lemah, dan kurangnya perlindungan pemerintah dari barang-barang impor, UMKM masih tetap tegar dan sedikit tersenyum sinis terhadap pemerintah. Jangan lagi UMKM hanya dijadikan pajangan di etalase kampanye saat Pilkada tetapi pemerintah harus legawa untuk merangkul UMKM dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat. (46)

— Dr Purwoko SE MM, dosen MM FEB UAD Yogyakarta.